

URGENSI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM KONSEP *SOUND GOVERNANCE*

Oleh :

Ari Kusumah Wardani¹, Arie Budiawan²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

E-mail: ari.kusumah@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Dalam kurun waktu yang lama Good Governance menjadi sebuah acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Namun demikian, perlahan-lahan beberapa aspek dalam pemikiran tersebut dianggap usang dan tidak kompatibel lagi dengan perkembangan dalam keilmuan Administrasi Publik sehingga muncul pemikiran baru sebagai penyempurnaan yang dikenal dengan Sound Government. Konsep ini dianggap lebih komprehensif karena berisi fitur normatif dan rasional dari good governance, memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih unggul, bercocokan dengan nilai konsistensi dan responsif kepada norma, aturan dan rezim internasional, memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Ada 1 hal yang sangat menonjol dalam Sound Governance. Hal tersebut adalah kerjasama/kemitraan internasional. Hal ini sangat diperlukan untuk difahami dan diimplementasikan dalam era globalisasi sekarang ini untuk memerangi penyakit-penyakit birokrasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi.

Kata Kunci: *Sound Governance, Kerjasama Internasional*

A. PENDAHULUAN

Administrasi Publik merupakan ilmu yang dinamis dan peka terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu dari waktu ke waktu Administrasi Publik selalu berevolusi dan beradaptasi terhadap perkembangan di mana ide-ide baru selalu muncul sebagai perbaikan ide-ide lama. Sebagai contoh, pada awal kemunculannya sebagai sebuah disiplin ilmu yang baru, Woodrow Wilson, seorang Politisi yang di kemudian hari menjadi konseptor Liga Bangsa-Bangsa dan juga Presiden Amerika Serikat, yang juga dianggap sebagai bapak Administrasi Publik, pada tahun 1887 dalam artikelnya yang berjudul "*The Study of Administration*" mengajukan gagasan baru dalam konsep Administrasi. Pemikirannya tersebut diantaranya

menyorot tentang pemisahan antara ilmu Politik dan Ilmu Administrasi, kemudian analisis perbandingan berkenaan dengan nilai-nilai yang ada dalam Organisasi Politik dengan swasta.

Selang beberapa waktu, di tempat yang berbeda, Max Weber, seorang ahli yang juga dianggap tokoh penting dalam perkembangan Administrasi Publik pada tahun 1920 mengajukan pemikirannya dalam sebuah essay berjudul "*Bureucracy*". dalam tulisan ini, Weber menjabarkan Birokrasi tersebut sebagai tipe ideal dari sebuah organisasi, khususnya organisasi publik atau yang berkaitan dengan pemerintahan.

Dalam kurun waktu yang lama, pemikiran-pemikiran tersebut "merajai" alam pemikiran para akademisi ilmu

Administrasi Publik di seluruh dunia, hingga perlahan-lahan beberapa aspek dalam pemikiran tersebut dianggap usang dan tidak kompatibel lagi dengan perkembangan Organisasi Administrasi Publik yang harus beradaptasi dengan zaman. Kokohnya gagasan-gagasan tersebut akhirnya tumbang dengan kemunculan gagasan baru terutama dengan munculnya buku berjudul "*Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*". Buku tulisan Ted Gaebler dan David Osborne yang dirilis pada tahun 1992 ini dari judulnya saja sudah menunjukkan "perlawanan" terhadap ide-ide lama dalam Administrasi Publik yang terkesan kaku dan memiliki gap yang sangat tinggi dengan nilai-nilai yang ada pada dunia bisnis yang pada akhirnya mengurangi efektivitas terutama dalam hal pelayanan Publik.

Begitu kuatnya pengaruh pemikiran yang tertuang dalam buku ini terhadap perkembangan ilmu Administrasi Publik hingga beberapa lembaga atau institusi internasional mengadaptasinya menjadi konsep praktis yang bisa diaplikasikan dan diimplementasikan. Beberapa yang paling berpengaruh adalah UNDP (United Nation for Development Program) dan World Bank pada tahun 1996. Good Governance difahami sebagai kinerja pemerintahan yang efektif. Hal ini mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana terjadi banyak kekurangan sehingga dikenal dengan istilah pemerintahan yang buruk (*bad government*). *Good Governance* mempunyai titik berat di mana peran pemerintah, sektor privat dan masyarakat sama-sama penting. Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan situasi dan payung hukum yang kondusif, sedangkan sektor privat

berperan dalam menciptakan peluang untuk lapangan pekerjaan untuk sumber pendapatan, sehingga mobilitas individu atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik dapat difasilitasi. Prinsip-prinsip dalam *Good Governance*, yang dapat mengukur kinerja pemerintahan di antaranya: Partisipasi, Penegakan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Orientasi konsensus, Keadilan, Efektifitas dan efisiensi, Tanggung jawab, Visi strategis. (UNDP dalam Maksudi, 2017: 337).

Namun demikian, sebagaimana para pendahulunya, ternyata konsep Good Governance ini mendapatkan "tantangan" dari konsep atau gagasan lain. Gagasan tersebut adalah *Sound Governance*. Konsep ini dianggap sebagai penyempurnaan dari *Good Governance*. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami apa itu *Sound Governance*, serta apa saja hal-hal penting apa saja yang ada di dalamnya. Itulah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya pada tulisan ini.

B. PEMBAHASAN

1. Sound Government Sebagai Sebuah Penyempurnaan

Sound Government pertama kali mengemuka melalui pemikiran Ali Faramzad seorang Profesor Administrasi Publik di Florida Atlantic University dalam tulisan-tulisannya hingga saat ini.

Sound Government dalam hal ini bisa dimaknai sebagai Pemerintahan yang sehat, layak, pantas atau ideal. Konsep ini muncul sebagai penyempurnaan dari *Good Governance* karena beberapa aspek berikut:

Lebih komprehensif, berisi fitur normatif dan rasional dari *good governance*, memiliki karakteristik kualitas *governance* yang lebih unggul, bercocokan dengan

nilai konsistensi dan responsif kepada norma, aturan dan rezim internasional, memiliki sistem administrasi efektif dan efisien.

Secara lebih jauh, Farazmand dalam Maksudi (2107: 351) membahas dimensi-dimensi dalam Sound Government:

1. Dimensi proses, yang mengatur segala interaksi elemen yang terlibat.
2. Struktur yakni sebuah badan elemen konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka pembuatan keputusan dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sanksi proses *governance*.
3. Kognisi dan nilai yang merepresentasikan system nilai yang unik dalam struktur atau proses *governance*.
4. Konstitusi pemerintahan sebagai dokumen dasar yang menjadi cetak biru dari *governance*.
5. Organisasi dan institusi yang jelas.
6. Manajemen dan kinerja yang merupakan bagian integral dari keseluruhan.
7. Kebijakan yang memberikan panduan, arahan dan kendali yang jelas bagi elemen atau dimensi proses, struktur dan manajemen.
8. Sektor yang berfokus pada hal yang lebih spesifik.
9. Kekuatan internasional atau globalisasi.
10. Etika, akuntabilitas dan transparansi.

Dalam konsep Sound Governance sistem pemerintahan yang digambarkan bukan hanya jelas secara demokratis, dan “tanpa cacat” secara ekonomi/finansial,

politik, demokratis, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional/global dalam interaksinya dengan negara-bangsa lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri.

Salah satu hal yang menjadi kritik Ali Farazmand terhadap prinsip good governance, adalah bahwa Konsep good governance hanya memfokuskan pada tiga komponen yaitu state, private, dan civil society. Dalam hal ini Ali Farazmand memahami bahwa ketiga komponen tersebut mengabaikan sebuah aspek lain yang merupakan kekuatan besar, yaitu aktor internasional. Aktor internasional merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada kemajuan negara-negara berkembang. Faktanya bahwa hampir satu abad ini globalisasi atau internasionalisasi terbukti mendominasi politik, ekonomi, bahkan budaya di negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, selain “golden triangle” (pemerintah, rakyat, swasta) yang sudah diusung dari konsep good governance yang sudah ada sebelumnya. Elemen internasional tersebut merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari era globalisasi. Negara manapun mau tidak mau harus merespon hal ini. Pengakuan elemen internasional yang diikuti dengan berbagai pertimbangan rasional dan teknis ini, dalam pandangan Ali Farazmand dapat mengurangi ketimpangan antara negara maju dan berkembang, sebagai dampak negatif dari penerapan good governance. Namun di sisi lain, elemen internasional ini juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal untuk mewujudkan keseimbangan dalam tatanan institusi.

Sound governance sangat penting karena berkaitan dengan berbagai sistem global untuk memastikan bahwa kolaborasi dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk sistem global dan kerja sama/kemitraan antar negara, dengan penekanan adanya kesetaraan hak setiap negara baik negara maju maupun berkembang sehingga mencegah terjadinya eksploitasi dan kapitalisasi ekonomi.

2. Kerjasama Internasional

Bila dicermati, ada 1 hal yang sangat menonjol dalam Sound Governance. Hal tersebut adalah kerjasama/kemitraan internasional.

Holsti (1988: 652) mendefinisikan Kerjasama internasional sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Perjanjian atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih untuk mengambil keuntungan dari kepentingan yang sama atau konflik kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dapat difahami bahwa Kerjasama Internasional adalah terjalinnya hubungan antara satu institusi dengan institusi lainnya (dalam scope lintas negara)

melalui kesepakatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kerjasama Internasional bentuknya bermacam-macam, mulai kerjasama ekonomi, perdagangan dan lain-lain.

Kerjasama internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Karena kerjasama internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam (meskipun ini bisa mencakup kerjasama dalam bidang ekonomi) melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat difahami bahwa Kerjasama Internasional memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing pihak yang mengadakan kerja sama.
2. Meningkatkan perekonomian pihak yang mengadakan kerja sama di berbagai bidang.
3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia.
4. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan.
5. Meningkatkan devisa, khususnya bagi negara.

Dapat difahami bahwa pada prinsipnya ada beberapa faktor yang menjadi alasan mendasar dilakukannya Kerjasama Internasional. Di antaranya:

- 1) Perbedaan sumber daya alam
Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada

negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contohnya Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri, padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerja sama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

2) Perbedaan iklim dan kesuburan tanah

Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis.

3) Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidak sama. Negara maju seperti

Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara berkembang seperti di Afrika dan sebagian Asia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat melakukan kerja sama dengan negara-negara maju. Dengan demikian negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

4) Perbedaan ideologi

Perbedaan ideologi antarsuatu wilayah negara dengan negara lain dapat memicu konflik antarnegara bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan perlu adanya kerja sama, sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya negara seperti Hongkong yang memisahkan diri dengan RRC yang berideologi komunis, memerlukan kerja sama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja perundingan.

Ada beberapa bentuk Kerja Sama Internasional, di antaranya:

1. Kerja sama bilateral

Merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan

singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra.

2. Kerja sama regional
Merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu.
3. Kerja sama multilateral
Merupakan kerja sama antara beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerja sama saling membantu di bidang ekonog, misalnya ASEAN.
4. Kerja sama antarregional
Merupakan kerjasama yang dilakukan antarregional yang satu dengan regional lainnya. Bertujuan menjamin kepentingan ekonomi antara dua kawasan, misalnya Asean dengan MEE.
5. Kerjasama G to NGO
Merupakan kerjasama yang dilakukan antara sebuah Negara dengan sebuah NGO (Non Governmental Organization) untuk sebuah kepentingan. Contohnya kerjasama Indonesia dengan IMF dalam rangka peminjaman modal
6. Kerjasama NGO to NGO
Merupakan kerjasama yang dilakukan sebuah NGO (Non Governmental Organization) Internasional dengan NGO lain di dalam negeri yang memiliki fokus yang sama. Misalkan

kerjasama WALHI dengan Green Peace terkait penanganan dampak illegal logging di Indonesia.

3. Peran Kerjasama/Kemitraan Internasional dalam Sound Governance

Pada prinsipnya, Kerjasama internasional diharapkan untuk memudahkan penyelesaian berbagai masalah pada suatu negara atau organisasi. Sound Governance adalah sebuah inovasi atau lebih tepatnya penyempurnaan terhadap good governance yang hanya cenderung menaruh perhatian pada masalah-maslah di negara berkembang sebagai masalah domestik semata. Sound Governance menawarkan strategi penataan kembali dalam aspek hubungan internasional yang dilakukan bersamaan dengan pembenahan internal. Ini merupakan agenda yang paling tepat untuk perbaikan sistem pemerintahan di negara berkembang yang sangat heterogen dan bervariasi.

Robert Keohane dan Joseph Nye (2005: 63) menjelaskan bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Instituis-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama

Secara khusus, Sound Governance menaruh perhatian yang lebih fokus dalam melihat aktor-aktor utama yang harus

dianalisis dalam sebuah proses tata kelola pemerintahan. Sound Governance memiliki pandangan yang lebih luas dimana tidak hanya melihat proses interaksi antara aktor-aktor domestik, yaitu pemerintah, pasar dan masyarakat sipil, namun demikian justru melihat besarnya peran aktor-aktor ekonomi politik internasional. Aktor-aktor internasional di sini sangat luas cakupannya, di antaranya: kebijakan luar negeri dari negara-negara maju, organisasi-organisasi multi lateral, korporasi global multinational corporation/transnational corporation (MNC/TNC), lembaga donor dan keuangan internasional, serta NGO yang besar. Indonesia sendiri merupakan "lokasi" di mana ditemukannya banyak bukti dan temuan ilmiah tentang begitu besarnya pengaruh aktor-aktor tersebut dalam dinamika sosial, politik dan ekonomi dalam negeri.

Kerjasama Internasional akan membiasakan sebuah negara untuk selalu menyesuaikan dengan dengan payung hukum internasional. Pemahaman ini sangat penting untuk mewujudkan organisasi administrasi publik yang 'peka terhadap globalisasi'. Karena pada prinsipnya, payung hukum dalam scope nasional dan di bawahnya haruslah menyesuaikan dengan Internasional, janganlah tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Contohnya payung hukum terkait buruh di Indonesia yang cenderung berseberangan dengan versi ILO. Tata kelola pemerintahan seharusnya selaras dengan perkembangan global yang tentunya diatur dalam payung hukum internasional.

Kerjasama internasional terutama yang dilakukan dalam kerangka Sound Governance hsecara lebih jauh akan berkontribusi pada perdamaian dan

kemananan dunia, karena mengedepankan diplomasi yang bertujuan agar semua negara di seluruh dunia dapat berada dalam kondisi damai, dan mengantisipasi terjadinya perang di masa mendatang yang akan sangat amat berdampak pada kemanusiaan.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini tentunya kerjasama Internasional sangat diperlukan untuk difahami dan diimplementasikan. Kemitraan/kerjasama terkait kesehatan global tentunya bertujuan untuk mengambil langkah-langkah solutif dalam mengentaskan pandemi dimulai dari tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. kerjasama dalam bidang ini sangat penting untuk berbagi informasi dan pengalaman penting terkait Pandemi Covid yang kemudian bisa diimplementasikan untuk mengatasi pandemi di wilayah masing-masing.

C. KESIMPULAN

Globalisasi mempengaruhi banyak hal termasuk perkembangan keilmuan serta tata kelola pemerintahan, khususnya administrasi Publik. Hal tersebut membuka kesempatan bagi penciptaan inovasi pemikiran dan paradigma sebagai penyempurnaan bagi yang sudah lama atau usang, yang dianggap masih ada kekurangan. begitu juga yang terjadi dalam ranah Administrasi Publik. Perkembangan keilmuan dalam bentuk penelitian, kajian dan inovasi terutama yang menyangkut globalisasi atau internasionalisasi tersebut tentunya dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan negara. Untuk alasan itulah maka Sound Governance muncul sebagai sebuah penyempurnaan.

Faktor yang paling menonjol dalam Sound Governance adalah keterlibatan aktor Internasional/global, atau bagaimana

menyikapi perkembangan global tersebut secara maksimal. dalam hal ini Sound Governance menekankan bahwa peningkatan aktivitas pemerintah melalui aktivitas internasional seperti interaksi/komunikasi, perjanjian, dan secara khusus dalam bentuk kerja sama.

Para akademisi, praktisi, terutama para pejabat yang berkepentingan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan dan Administrasi hendaknya memahami pentingnya menyikapi Sound Governance terutama dalam aspek Internasional ini. Pada saat ini semua elemen negara semakin dituntut untuk bekerja bersama dalam berbagi informasi untuk bisa menerapkan kebijakan yang diperlukan dalam urusan domestik masing-masing tanpa saling intervensi.

Pada prinsipnya, Kerjasama antar negara adalah sarana untuk mempercepat pembangunan yang merupakan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Administrasi Publik di setiap dan lintas wilayah atau negara. dalam kerangka sound governance, kerjasama internasional merupakan kesempatan untuk transfer dan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan berbagai sumber daya dan kapasitas yang ada terutama sumber daya manusia.

Selain itu Kerjasama internasional sangatlah penting untuk difahami dan diimplementasikan dalam era globalisasi untuk memerangi penyakit-penyakit birokrasi yang akut seperti korupsi, rent seeking yang pada saat ini sudah meluas menjadi permasalahan bersama bagi semua negara di dunia. Bertukar informasi, pengalaman, dan benchmarking dalam pemberantasan penyakit-penyakit ini tentunya sangat bermanfaat bagi stabilitas dunia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance in the Age of Globalization: A Conceptual Framework. in Ali Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Westport: Praeger
- Gaebler, Ted & Osborne, David. 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming Public Sector*. Basic Books.
- Holsti, K.J. 1988: *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik, dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Putra, Fadillah: *Sound Governance Berakhirnya Era Good Governance*.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2005: *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rudy, Teuku M. 1998. *Organisasi internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Negara Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.